

BAB II

PERKEMBANGAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT SEBAGAI ALAT INTERVENSI KEMANUSIAAN DI SUDAN ERA-PASCA TRUMP 1.0

2.1 Latar Belakang Intervensi Kemanusiaan di Sudan

2.1.1. Sejarah konflik dan krisis kemanusiaan di Sudan

Konflik sipil antara Sudan dan Sudan Selatan sudah menjadi ancaman yang signifikan. Perang tersebut telah berkecamuk sejak tahun 1955-1972. Melalui *Protokol Addis Ababa* yang diresmikan pada tanggal 27 Maret 1972 di Addis Ababa, Ethiopia, konflik pertama berhasil diredakan. Kemudian, perang saudara Sudan yang kedua berlangsung dari tahun 1983 hingga 2005, merupakan perang sipil yang sangat parah mengakibatkan terjadinya kelaparan dan kekejaman yang tercatat secara luas selama pertempuran, yang merenggut nyawa sekitar dua juta orang. Upaya perdamaian *Comprehensive Peace Agreement* (CPA) yang ditandatangani pada 9 Januari 2005, diselenggarakan referendum di mana 90% masyarakat Sudan Selatan memilih menjadi negara independen pada Juli 2011 (Cahyanti, 2017).

Tidak hanya itu, isu kelaparan dan kesehatan juga menjadi permasalahan akibat adanya perang tersebut. Sekitar lima juta orang telah mengungsi, dan setengah juta orang lainnya melarikan diri melintasi perbatasan negara. Puluhan ribu wanita dan anak-anak telah diculik dan dipaksa menjadi budak (Global Conflict Tracker, 2025). Namun, dengan

adanya disintegrasinya Sudan dan Sudan Selatan, tidak kunjung menyelesaikan konflik di tanah Sudan. Sudan mengalami konflik lain seperti kudeta militer Oktober 2021, perebutan kekuasaan antara SAF dan RSF pada April 2023 (Global Conflict Tracker, 2025).

2.1.2. Keterlibatan aktor internasional dalam isu kemanusiaan di Sudan

Pada periode Donald Trump, ia berhasil melakukan proses pencabutan Sudan dari daftar nama negara pendukung terorisme (SST). Hal tersebut disebabkan karena Sudan sudah dianggap tidak melakukan kerjasama dengan kelompok terorisme. Saat Amerika Serikat berada dibawah kepemimpinan Joe Biden yang resmi menjadi presiden pada bulan Januari 2021. Biden menunjuk utusan khusus yaitu Jeffrey Feltmen, Amerika di Sudan, yang bertujuan untuk mengembalikan perdamaian dengan memberikan bantuan finansial, pinjaman berjaminan, pembangunan infrastruktur, serta pengelolaan keamanan yang terhitung cukup muda disana. Namun, kudeta militer, cukup mencengangkan Amerika Serikat. Hal tersebut disebabkan karena kudeta tersebut terjadi pasca dilakukannya pertemuan antara Burhan dan Feltment yang melakukan kesepakatan antara militer dan sipil. Dalam jeda beberapa jam saja sudah dinodai (Waal, 2021). Sebagai respon Amerika Serikat, bantuan ekonomi sebesar USD \$700 juta dibekukan kepada pemerintahan transisi

Sudan dengan tujuan mengecam dengan tegas aksinya untuk segera diberhentikan (DW, 2021).

Pada masa kepresidenan Joe Biden, akhir tahun 2022, ada harapan bahwa proses perdamaian yang didukung aktor internasional seperti PBB, UAE, EU dapat kemungkinan untuk tercapai. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada akhirnya akan menghasilkan pemerintahan sipil di Sudan, setelah periode bergejolak yang membuat diktator jangka panjang Omar al-Bashir digulingkan dalam kudeta militer, yang diikuti oleh penindasan keras terhadap protes yang mendukung pemerintahan sipil (United Nations, 2025). Namun, Ketegangan antara kedua belah pihak meningkat pada awal 2023. Dengan konflik berkala, tetapi perang saudara saat ini dimulai pada 15 April dengan serangan RSF di Khartoum, ibu kota. Konflik meluas ke seluruh negeri, memaksa PBB untuk meninggalkan Khartoum dan mendasarkan operasi di kota Port Sudan yang relatif damai di Laut Merah (United Nations, 2025).

Ketika tahun kedua dimulai, dua faksi di Sudan terjebak dalam lingkaran setan perebutan kekuasaan. Sejak konflik dimulai pada 15 April 2023, sekitar 15.000 orang telah terbunuh dan lebih dari 8,2 juta orang mengungsi, yang mengakibatkan krisis pengungsi global. Sekitar 2 juta pengungsi Sudan telah mengungsi ke daerah-daerah yang tidak stabil di Chad, Ethiopia, dan Sudan Selatan, mendirikan tenda-tenda pengungsian dan meningkatkan harapan bahwa para pengungsi Sudan akan segera dapat

mencapai Eropa. PBB terus memohon dukungan lebih banyak karena lebih dari 25 juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan, dan membuat risiko keamanan pangan memicu “krisis kelaparan terbesar di dunia.” Selain itu, upaya mediasi gagal membuahkan hasil dari para pemimpin SAF dan Pasukan Pendukung Cepat. Di sisi lain, upaya mediasi dapat dikatakan gagal karena para pemimpin Angkatan Bersenjata Sudan SAF dan Pasukan Pendukung Cepat RSF menolak untuk menghentikan pertumpahan darah, dan entitas-entitas regional serta internasional telah memihak dalam konflik tersebut. Dengan kondisi yang semakin memburuk (Global Conflict Tracker, 2025).

Pada konferensi tahunan tingkat tinggi *African Union* di Addis Ababa, Ethiopia, Sekretaris Jenderal PBB mengutuk situasi di Sudan sebagai “skala dan kebrutalan yang mengejutkan” dan memperingatkan bahwa situasi ini secara bertahap meluas ke wilayah yang lebih luas. PBB telah mengecam keras pertempuran tersebut, dan Ramtane Lamamra, Utusan Pribadi Sekretaris Jenderal PBB untuk Sudan, masih bekerja sama dengan lembaga-lembaga regional, terutama Uni Afrika (AU), untuk mendorong upaya-upaya perdamaian (United Nations, 2025).

Selanjutnya, *United Emirates Arab* (UAE). Mengutip sumber-sumber di antara kelompok-kelompok bersenjata dan para pemimpin suku di Chad timur dan Darfur, Panel PBB mengonfirmasi klaim sebelumnya bahwa UEA menyumbangkan persenjataan kepada

RSF. Sebelum konflik saat ini, negara Arab Teluk yang kaya minyak ini memiliki sejarah dengan RSF, dengan mempekerjakan tentaranya sebagai tentara bayaran di Yaman. Pemantau penerbangan mencatat penerbangan kargo dari UEA ke kota Amdjaras, Chad di bagian timur Yaman. Menurut laporan setempat, senjata dan amunisi dimuat ke dalam truk dan diangkut ke Darfur dalam konvoi-konvoi kecil sebelum diserahkan kepada RSF. Berdasarkan (United Nations, 2004), dilakukannya transfer senjata ini, UEA melanggar embargo senjata Dewan Keamanan PBB yang ditetapkan lebih dari dua dekade sebelumnya, pada tahun 2004 (Sudan War Monitor, 2024).

Pada tanggal 23 September, *White House* merilis sebuah pernyataan yang merangkum pertemuan bilateral terbaru antara Presiden Uni Emirat Arab (UEA), Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, dan Presiden Biden. Dokumen yang panjang itu menekankan kemitraan AS-UEA yang erat, dan pada paragraf keenam di bawah judul “Mitra dalam Timur Tengah dan Kawasan yang Lebih Luas yang Stabil, Terintegrasi, dan Sejahtera,” kedua pemimpin tersebut menyatakan keprihatinan dan kekhawatiran bersama tentang krisis di Sudan (Gavin, 2024).

Mengingat Semuanya terdengar baik sampai kita mempertimbangkan bukti bahwa UEA merupakan pihak yang telah membantu salah satu pihak yang bertikai dalam konflik Sudan, Pasukan

Rapid Support Forces (RSF). RSF lebih menyerupai gerombolan kriminal daripada gerakan politik. Tidak ada skenario yang masuk akal di mana RSF mengelola Sudan yang stabil. Kekejaman adalah kartu nama RSF. Tentara yang tidak terkendali dan merampok ini bertanggung jawab atas kekerasan seksual dan pembersihan etnis yang meluas. Meskipun sudah berbulan-bulan diminta oleh Uni Afrika dan PBB, RSF terus menyerang El Fasher, satu-satunya pusat populasi utama di Darfur yang tidak berada di bawah kendalinya (Gavin, 2024).

Harapan dari realitas alternatif yang digambarkan dalam pernyataan *White House* adalah bagian dari harga yang harus dibayar untuk mendapatkan komitmen nyata dari UEA untuk berhenti menyiramkan bensin ke api yang melanda Sudan. Pada tanggal 24 September 2024, satu hari setelah pertemuannya dengan bin Zayed, terucap “dunia harus berhenti mempersenjatai para jenderal, berbicara dengan satu suara dan mengatakan kepada mereka, maka berhentilah mencabik-cabik negara Anda” yang dikatakan oleh Presiden Biden kepada Majelis Umum PBB (Gavin, 2024).

Tidak hanya itu, *European Union* (EU) telah memberikan sanksi kepada enam perusahaan yang diyakini terkait dengan pihak-pihak yang bertikai di Sudan. Dalam sebuah pernyataan berita, Dewan Eropa menyatakan “Di antara entitas-entitas yang terdaftar adalah dua perusahaan yang memproduksi senjata dan kendaraan untuk SAF seperti

Zadna International Company for Investment Limited yang dikontrol SAF, dan tiga perusahaan yang mengadakan peralatan militer untuk RSF yaitu *Al Junaid Multi Activities Co Ltd*, *Tradive General Trading*, dan *GSK Advance Company Ltd*. Perusahaan-perusahaan yang disebutkan di atas dikenai pembekuan aset. Dengan memberikan bantuan finansial atau sumber daya kepada mereka berisiko untuk menunjang konflik, baik secara langsung maupun tidak langsung karena merupakan tindakan yang melanggar hukum (European Council, 2024). Sehingga Amerika Serikat dan Inggris menjatuhkan sanksi terhadap beberapa perusahaan ini (*European Union Sanctions Sudanese Businesses*, 2024).

2.2. Kebijakan Luar Negeri AS Terkait Intervensi Kemanusiaan

2.2.1. Prinsip *Responsibility to Protect (RtoP)*

Sebagai negara yang mendukung prinsip *Responsibility to Protect (RtoP)*, maka AS perlu untuk melaksanakan prinsip tersebut. Prinsip “*Responsibility to Protect*” dalam hubungan internasional bertujuan untuk mengurangi pembunuhan massal, konflik etnis, dan ancaman terhadap kehidupan manusia. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap negara memiliki kewajiban untuk melindungi warga negara dari tiga jenis kekerasan adalah yang terpenting. Selain itu, organisasi internasional memiliki tanggung jawab untuk membantu negara-negara dalam mencapai tujuan mereka. Jika sebuah negara tidak memiliki kapasitas atau sumber daya untuk melindungi warga negaranya, maka menjadi tanggung jawab komunitas

internasional untuk melakukan intervensi guna melindungi penduduk dari kekerasan massal dan ancaman lainnya.

Terdapat tiga prinsip untuk menerapkan “*Responsibility to Protect*”. Setiap pilar penting dan harus dilaksanakan secara sistematis untuk mengurangi adanya resiko dalam penyelamatan. Tiga prinsip utama tersebut yaitu kewajiban suatu negara dalam melindungi masyarakatnya dari segala kejahatan terhadap kemanusiaan. Kedua, membantu negara-negara lain dalam memenuhi kewajiban negaranya masing-masing. Ketiga, Mendesak semua anggota PBB untuk melakukan reaksi dengan segera dan sistematis jika suatu negara tidak dapat memberikan perlindungan yang diperlukan secara efektif.

2.2.2 Perubahan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat di Sudan Sebelum Trump

Perubahan kebijakan luar negeri yang secara berulang dilakukan oleh Amerika Serikat di Sudan yang menyebabkan fluktuasi kebijakan luar negeri dapat terjadi akibat perubahan situasi dalam dinamika konflik tersebut. Kebijakan luar negeri merupakan bentuk penyesuaian upaya yang dimiliki Amerika Serikat terhadap Sudan. Perubahan kebijakan Amerika Serikat di Sudan sudah dimulai sejak tahun 2000-an dimana Bill Clinton menjabat sebagai presiden Amerika saat itu. Amerika melihat Sudan sebagai negara berbahaya karena dukungan Khartoum terhadap aksi terorisme, konflik sipil yang terus berlanjut, serta memarjinalisasikan hak

asasi manusia setelah terjadinya revolusi Islamis Sudan di tahun 1989. Ditetapkannya sanksi Embargo melalui *Executive Order 13067* pada 3 November 1997, merupakan upaya untuk mengecam pihak revolusi Islamis tersebut (National War College et al., 2003, 3-4). Dampak dari revolusi tersebut semakin membuat Amerika khawatir dengan melonjaknya pemberontakan lintas batas di Sudan. Sejalan dengan sanksi embargo, Amerika memiliki strategi untuk memediasi Sudan dengan melakukan kerjasama diplomatik dengan negara regional yaitu “*Front Line States*” bersama Eritrea, Etiopia, dan Uganda. Namun, seiring berjalannya waktu upaya Clinton tersebut dinyatakan kurang berhasil karena kurangnya keterlibatan aktor internasional dalam upaya tersebut. Pada masa kepemimpinan Clinton, Amerika mengalami periode “kinerja ekonomi kuat” yang dimana Amerika memiliki surplus dan pengaliran ekonomi yang lancar. Keberhasilan domestik itu juga sejalan dengan adanya reformasi kesejahteraan disana melalui Undang-Undang Tanggung Jawab Pribadi dan Kesempatan Kerja tahun 1996. Sehingga, Amerika Serikat memiliki dana yang cukup dalam membantu negara lain untuk mendapatkan kesejahteraannya (The White House, n.d.).

Berbeda dengan Clinton, saat George Bush menjadi presiden Amerika ia beranggapan bahwa negara di benua Afrika seperti Sudan tidak memiliki kapabilitas untuk menjadi ancaman bagi Amerika Serikat. Namun, saat tahun pertama kepemimpinan tersebut mendapat tekanan dari berbagai pihak untuk segera merubah pandangan tersebut. Dengan begitu,

Sudan kembali ditetapkan sebagai prioritas strategi Amerika Serikat di belahan Afrika. Lembaga Pertahanan dan Intelijen Amerika Serikat Lembaga Pertahanan dan Intelijen Amerika Serikat mulai untuk menata kembali kehadirannya di Khartoum, Sudan, dengan menyediakan kerangka kerja *United States Agency for International Development (USAID)* dengan tujuan untuk memprioritaskan agenda kemanusiaan di Sudan. Meskipun Bush memfasilitasi Sudan dengan memberikan USAID, namun ia enggan untuk mempersenjatai para pihak yang berkonflik dan tidak ingin memihak salah satu pihak. Kurang dari setahun masa kepemimpinan Bush, Sudan berhasil menjadi salah satu dari empat negara prioritas di Sudan dalam isu perang dan perdamaian (National War College et al., 2003, 3-4).

Kemudian, pada era George Bush menjadi presiden Amerika Serikat ia sempat skeptis dengan Sudan karena tidak memiliki indikasi untuk menjadi ancaman bagi Amerika Serikat. Namun, akibat dorongan dari pihak eksternal yang mulai mengecam perspektif tersebut, ia menemukan *turning point* untuk kembali memusatkan kebijakan strategis di Sudan untuk menuntaskan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pasca terjadinya “Serangan Terorisme” pada 11 September 2001 semakin memperkuat kepentingan domestik dan internasionalnya mengenai prioritas melawan terorisme melewati kebijakan luar negeri *Executive Order 13224*.

Komitmen Amerika Serikat dengan memberikan bantuan kemanusiaan yang signifikan yang Amerika miliki di Sudan. Sejak tahun 2005, bantuan yang diberikan berbentuk pembangunan, fasilitas perdamaian, dan bantuan kemanusiaan dengan nominal lebih dari \$4 miliar USD. Bantuan lainnya adalah biaya operasional penjaga perdamaian gabungan UN-AU dan *United Nations Mission in Sudan (UNMIS)* di Darfur sebesar 25% diluar dana yang diberikan oleh PBB kepada masyarakat Sudan dan Chad Timur. Dibangun dan dipeliharanya 34 *basecamp* di Darfur bagi lebih dari 7.000 pasukan AU, serta memberikan donor makanan bulanan sebanyak 40.000 metrik ton (U.S Department of State Archive, 2007).

Perubahan kebijakan dari era Clinton yang lebih mengarah kepada kebijakan isolasi, menuju Bush yang memusatkan kebijakannya dengan terlibat secara kuat dengan Sudan menyebabkan ditunjuknya Utusan Khusus untuk Perdamaian di bulan yang sama, Senator John Danforth. Keterlibatan diplomatik Amerika di bawah Danforth menjadikan Amerika sebagai negara yang berpartisipasi langsung dalam upaya perdamaian *Comprehensive Peace Agreement (CPA)* yang sempat berhasil menyelesaikan konflik sipil selama dua dekade tersebut (Williamson, 2011, 4).

Di sisi lain, kebijakan luar negeri Amerika Serikat disebabkan juga oleh konflik Darfur atas pelanggaran hak asasi manusia disana yang mengalami eskalasi secara signifikan, dengan lebih dari 200.000 orang meninggal dan hampir 2 juta manusia mengungsi pada tahun 2005 (Pusat

Aksi Pencegahan, 2025). Selain itu adanya campur tangan dari aktor internasional seperti China dalam lanskap ekonomi dan politik, semakin meningkatkan kompleksitas sistemik Amerika Serikat.

Selanjutnya adalah masa kepemimpinan Barack Obama. Obama memiliki fokus strategi yang berbeda. Pada 19 Oktober 2009, Menteri Luar Negeri Hillary Clinton menyampaikan kebijakan luar negeri Amerika Serikat menargetkan implementasi dari *Comprehensive Peace Agreement (CPA)* tahun 2005 sebagai upaya mendamaikan konflik yang terjadi, serta melakukan pergerakan perdamaian antara Sudan dan Sudan Selatan melalui referendum tahun 2011, yang salah satunya bertujuan untuk menjadi Sudan Selatan sebagai negara independen (Norris, 2009). Alih alih menghukum, upaya pergeseran kebijakan tersebut bertujuan untuk memperjelas bagaimana posisi Amerika Serikat terhadap Sudan. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa upaya diplomatik tersebut dapat memperoleh manfaat jangka panjang. Dengan melihat implementasi CPA tersebut, bertujuan untuk meredakan krisis kemanusiaan yang terjadi. Namun, pasca disintegrasinya Sudan Selatan tidak kunjung menyelesaikan konflik. Hal tersebut menjadi faktor fundamental terjadinya tantangan baru karena ketidakmerataan alokasi sumber daya yang dimiliki kedua negara tersebut serta pemisahan wilayah disana (Williamson, 2011, 4).

Pergeseran kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh Obama dilatar belakangi oleh prioritas kebijakan domestik yang berubah akibat krisis ekonomi yang signifikan di Amerika Serikat di akhir masa kepemimpinan

Bush. Dampak dari krisis ekonomi tersebut adalah pemangkasan lingkup kebijakan luar negeri secara menyeluruh dan perubahan alokasi sumber daya. Bergesernya kebijakan domestik Amerika Serikat berkaitan erat dengan momen “Resesi Hebat” disana. Selain itu, terdapat inisiasi Amerika Serikat untuk melakukan proses menghapus Sudan dari daftar negara sponsor terorisme pada Januari 2017. Saat era Obama, Sudan cukup kooperatif menjadi mitra kontra-terorisme dan mematuhi semua komitmen CPA didalamnya (Quaranto, 2011).

Di luar kebijakan diplomatiknya, terdapat kebijakan kemanusiaan yaitu Amerika yang dimana masih menyediakan bantuan serta menjadi pendonor kemanusiaan terbesar disana (Quaranto, 2011). Pada sekitar bulan Mei dan Juni 2009, Amerika Serikat juga berhasil untuk memasukkan kembali lima *humanitarian organization* ke Darfur. Meskipun terdapat dokumen pemerintahan AS yang menyatakan bahwa hal tersebut gagal, namun nyatanya tingkat bantuan yang diterima Sudan meningkat dari sebelum pengusiran terhadap OI yaitu beberapa bulan sebelumnya yang terjadi pada bulan maret 2009 (Williamson, 2011, 7). Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa perubahan kebijakan luar negeri yang dilakukan presiden Clinton-Obama, dari awal ditetapkan-dicabutnya sanksi ekonomi berikut terus mengalami fluktuasi kebijakan yang didasari oleh dinamika konflik yang terjadi setiap masanya.

2.3. Posisi Amerika Serikat di Sudan pasca Trump

2.3.1. Bantuan Ekonomi-Kemanusiaan Amerika Serikat dan Organisasi Internasional Sebagai Tanggung Jawab Kemanusiaan

Amerika Serikat telah memberikan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Sudan selama beberapa dekade, meskipun ada kebutuhan yang sangat besar akibat konflik, pengungsian, dan bencana alam. Sebagai penyedia bantuan kemanusiaan terbesar di dunia, Amerika Serikat terus mendukung kelompok-kelompok yang paling rentan di Sudan. Selain itu, Amerika Serikat membantu Sudan dalam mengembangkan masyarakat yang inklusif, transparan, dan demokratis untuk meningkatkan ketahanan masyarakat yang rentan terhadap guncangan kritis, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Bantuan pembangunan Amerika Serikat mendukung upaya Sudan untuk menyelesaikan perpecahan antara pusat dan pinggiran Sudan, untuk memberlakukan perubahan politik dan ekonomi. Amerika Serikat akan terus memprioritaskan bantuan pembangunan untuk inisiatif-inisiatif yang memungkinkan perempuan, kaum muda, dan penduduk yang terpinggirkan untuk memainkan peran aktif dalam membangun dasar demokrasi Sudan dan menumbuhkan prospek ekonomi.

Terdapat beberapa lembaga internasional yang turut memberikan bantuan kemanusiaan kepada Sudan seperti WHO, OCHA, UNHCR, WFP, UNICEF, FAO, dan OLS. *World Health Organization of the United*

Nations (WHO) memberikan berbagai bantuan kepada Sudan, untuk menjaga layanan medis, persediaan trauma dan bedah, serta obat-obatan yang diperlukan. Selain itu, mereka juga membantu memastikan bahwa layanan kesehatan di masyarakat yang terkena dampak konflik tetap berkelanjutan dan bahwa lokasi-lokasi prioritas memiliki pasokan pasokan medis darurat dan obat-obatan yang stabil (World Health Organization, 2023). Selanjutnya adalah *United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs of the United Nations* (OCHA). Terdapat beberapa jenis bantuan yang diberikan oleh OCHA kepada Sudan, seperti bantuan keuangan, logistik, dan kemanusiaan untuk operasi lapangan. Selain bantuan dalam bentuk barang, yang disarankan untuk dikirim melalui koneksi resmi PBB, ada juga dorongan untuk donasi keuangan yang lebih fleksibel dan cepat (OCHA, 2024).

Dalam konflik ini, *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) memiliki peran untuk mendukung masyarakat di Sudan yang telah dipindahkan secara paksa dan mereka yang menjadi tuan rumah bagi para pengungsi dan pencari suaka, UNHCR telah meningkatkan sumber dayanya. Sumber daya tersebut kini mencakup tempat penampungan darurat, air bersih, bantuan tunai, dan pasokan dan layanan bantuan dasar seperti pendidikan, bantuan hukum, dan dukungan psikososial. UNHCR memberikan bantuan yang sangat dibutuhkan bagi jutaan orang yang terkena dampak kekerasan, kekurangan pangan, dan banjir baru-baru ini di Negara Bagian Darfur melalui operasi lintas batas

dari Chad (UNICEF - For Every Child, 2024). Kemudian, *World Food Programme of the United Nations* (WFP) berupaya untuk jutaan menyelamatkan nyawa. Setiap hari, menaungi bantuan dengan mengirimkan ratusan truk yang berisi makanan dan nutrisi yang dibutuhkan masyarakat sipil yang terdampak (UNICEF - For Every Child, 2024).

Tidak hanya itu, *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF) juga mengambil aksi. Untuk sekitar 14 juta anak yang membutuhkan bantuan kemanusiaan, UNICEF berupaya untuk menyediakannya. Hal ini termasuk menyediakan air minum bersih untuk 7,5 juta anak dan keluarga mereka, makanan terapeutik siap pakai untuk mengobati sekitar 334.000 anak di seluruh negeri, serta bantuan konseling psikologis, pembelajaran, dan perlindungan untuk 2,3 juta anak dan pengasuh (UNICEF - For Every Child, 2024).

Selanjutnya, *Food and Agriculture Organizations of the United Nations* (FAO). Dengan dibantunya FAO, masyarakat Sudan dapat mendapatkan informasi mengenai pangan, pertanian, dan binatang yang berguna untuk membantu pengembangan sistem pertanian nasional, pengorganisasian dan *monitoring* efektif dalam sektor pertanian, serta mengorganisasi ketahanan pangan di Sudan (Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2018).

2.3.2. Politik dan Diplomasi

2.3.2.1. Dukungan Kemerdekaan dan Perdamaian

Pasca terpecahnya Sudan dan Sudan Selatan, kedua negara tersebut belum menemukan titik terangnya perpecahannya tersebut. Pada bulan Januari 2005, Amerika Serikat mengambil sikap dengan membantu mediasi diplomatik bersama Intergovernmental *Authority on Development (IGAD)* melalui *Comprehensive Peace Agreement*. Dalam CPA, terdapat pembagian wilayah antara Sudan dan Sudan Selatan, peluncuran senjata, dan penghentian milisi Arab bersenjata, dan pembagian hasil minyak. Tentunya, CPA merupakan bentuk pencapaian diplomasi yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Sudan. Namun, seiring keberjalanannya, CPA dinilai gagal dalam meredakan konflik tersebut. Seperti halnya, CPA gagal dalam memobilisasi secara keseluruhan militer Arab, sedikitnya transparansi data yang dimiliki (Williamson, 2011, 4).

Penyelesaian konflik Sudan belum juga ada hilalnya hingga saat ini, tentunya konflik ini menjadi sangat menarik perhatian internasional. Dengan pembatasan-pembatasan yang pemerintah Sudan lakukan, menyulitkan mediasi dan negosiasi yang ingin dilakukan oleh pihak eksternal. Usaha internasional bergantung pada tiga metode yang berbeda yaitu diskusi mengenai keamanan yang berkonsentrasi pada pemberhentian pelucutan senjata dan perlindungan terhadap warga sipil, akomodasi pribadi saat

pertemuan al-Burhan dan Hemedti, serta pengelompokkan blok blok sipil sebagai opsi “kekuatan ketiga”. Mei 2023, Amerika Serikat bersama dengan Arab Saudi memimpin diskusi mengenai perlindungan warga sipil dan pemberhentian pelucutan senjata yang berhasil ditandatangani oleh SAF dan RSF. Namun, pasca penandatanganan tersebut, kedua belah pihak tidak mematuhi komitmen yang telah disetujui. Pada pertemuan kedua, kedua pihak tidak memberikan konfirmasi mengenai pembahasan terkait putaran pertama yaitu untuk meningkatkan akses kemanusiaan. Saat Amerika Serikat berupaya mempertemukan kedua pihak yang bertikai, SAF menolak undangan pertemuan tersebut dan menolak untuk diperlakukan sejajar dengan RSF. Thomas Perriello, Utusan Khusus Amerika Serikat, hanya dapat berupaya memediasi dengan bertemu dengan al-Burhan di pelabuhan Sudan pada November 2024. Namun, upaya tersebut semakin meredup di karenakan ruang lingkup yang kian mengecil akibat usainya masa kerja rezim Biden. Singkatnya, upaya mediasi pihak yang berkonflik memiliki tantangannya tersendiri. Mediasi yang telah dilakukan dapat dikatakan gagal dalam memperhitungkan dinamika kompleks yang dimiliki oleh kedua belah pihak meskipun telah melibatkan pihak internasional, akibat pihak internal yang menolak untuk terjadinya kompromi perdamaian (Kurtz, 2025).

2.3.2.2. Hubungan Strategis Regional

Pada tahun 2019, pasca jatuhnya rezim Omar al-Bashir yang telah memimpin Sudan selama tiga dekade, Inggris bergabung dengan *Friends of Sudan*. Kelompok tersebut merupakan kelompok diplomatik informal yang dibangun oleh Amerika Serikat dan Sudan. Tujuan dari kelompok FoS adalah menunjang proses transisi Sudan menuju demokrasi. Anggota aktif FoS terdiri dari negara Amerika Serikat, Arab Saudi, Jerman, Mesir, Prancis, Qatar, Swedia, Uni Afrika (AU), Uni Emirat Arab, Uni Eropa. Pertemuan kelompok FoS berkonsentrasi pada mengatur dukungan ekonomi pada fase ini, seperti program pembebasan hutang dan menetapkan program pemberian dana untuk masyarakat sipil yang terdampak dari pencabutan subsidi bantuan kemanusiaan dan inflasi yang melonjak. Namun, pasca kudeta Oktober 2021, organisasi FoS mulai dibubarkan dan diganti dengan program misi PBB setelah meletusnya perang kembali. Tentunya, dengan keterikatan yang terjalin antara Amerika Serikat dengan negara-negara anggota Friends of Sudan, menjadi bentuk terikatnya AS dengan negara internasional, terutama dengan negara regional (Kurtz, 2025).

2.3.4. Keamanan dan Militer

Dengan letak strategisnya Sudan yang berada di Laut Merah, dan berbatasan dengan Arab Saudi dan hulu Sungai Nil Mesir. Sepanjang sejarahnya, Sudan mulai menarik perhatian global saat pasca terjadinya

krisis Suez tahun 1959. Dalam tengah gejolaknya Sudan kala itu, Amerika mulai untuk bersiap melakukan intervensi militer secara langsung di Timur Tengah, yang merupakan bentuk implementasi dari Doktrin Eisenhower. Dengan meningkatnya Angkatan Laut Amerika Serikat disana, diharapkan dapat memiliki akses ke dalam Pelabuhan Sudan. Dalam intervensinya Amerika Serikat mengenai keamanan dan militernya di Sudan memiliki tujuan untuk kepentingan strategis AS dalam memantapkan jalur militer di Timur Tengah dan menepis meluasnya pengaruh Uni Soviet di benua Afrika dan Timur Tengah (Lefebvre, 1991).

2.4. Bentuk Intervensi Kemanusiaan Amerika Serikat di Sudan pasca Trump

1.0

Amerika Serikat telah memberikan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Sudan selama beberapa dekade, meskipun ada kebutuhan yang sangat besar akibat konflik, pengungsian, dan bencana alam. Sebagai penyedia bantuan kemanusiaan terbesar di dunia, Amerika Serikat terus mendukung kelompok-kelompok yang paling rentan di Sudan, termasuk para pengungsi dan mereka yang terkena dampak konflik, mereka yang tinggal di kamp-kamp pengungsian, komunitas lokal yang menampung para pengungsi, dan para pengungsi yang kembali dari pengungsian. Selain itu, Amerika Serikat membantu Sudan dalam mengembangkan masyarakat yang inklusif, transparan, dan demokratis untuk meningkatkan ketahanan masyarakat yang rentan terhadap guncangan kritis, dan

mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pada Konferensi Kemitraan Sudan di Jerman pada Juni 2020, AS berkomitmen untuk memberikan bantuan pembangunan dan kemanusiaan sebesar 356 juta dolar AS, yang telah terlampaui (U.S Department of States, 2022).

Bantuan pembangunan Amerika Serikat mendukung upaya Sudan untuk menyelesaikan perpecahan antara pusat dan pinggiran Sudan, untuk memberlakukan perubahan politik dan ekonomi yang akan memberikan masa depan yang lebih cerah bagi rakyat Sudan, terutama perempuan dan pemuda, dan untuk menciptakan keadilan bagi kejahatan yang dilakukan terhadap rakyat Sudan. Amerika Serikat akan terus memprioritaskan bantuan pembangunan untuk inisiatif-inisiatif yang memungkinkan perempuan, kaum muda, dan penduduk yang terpinggirkan untuk memainkan peran aktif dalam membangun dasar demokrasi Sudan dan menumbuhkan prospek ekonomi. Sebagai reaksi atas kudeta militer, Amerika Serikat menunda dan kemudian mengalihkan bantuan luar negeri untuk memastikan bahwa bantuan tersebut tidak akan mendukung pemerintah Sudan. Bantuan kemanusiaan dan bantuan lainnya untuk para pelaku masyarakat sipil, pengungsi, dan kelompok-kelompok rentan lainnya terus berlanjut (U.S Department of States, 2022).

2.5 Kepentingan Keamanan Energi Amerika Serikat di Sudan

2.5.1. Sumber Daya Energi Sudan dan Peranannya dalam Pasar Global

Meskipun Sudan adalah peserta kecil di panggung minyak global, minyak telah memainkan peran penting dalam ekonomi dan politik internal dan internasional di utara dan selatan sejak penemuannya pada akhir tahun 1970-an. Kekayaan minyak memicu fase kedua konflik sipil Sudan, dan pembagian uang hasil minyak merupakan komponen penting dalam Perjanjian Perdamaian Komprehensif (CPA) tahun 2005. Hal ini telah menjadi titik kunci dalam diskusi-diskusi pasca referendum. Sudan memproduksi 490.000 barel per hari (bph) pada tahun 2009, naik dari 2.000 bph pada tahun 1993. Menurut angka-angka pemerintah, produksi turun sekitar 3% pada tahun 2010. Sudan-utara dan selatan yang memiliki 0,5% dari cadangan minyak dunia yang diketahui dan menyumbang sekitar 0,6% dari produksi global. Dalam hal minyak global, negara ini sejajar dengan Ekuador dan Guinea Khatulistiwa sebagai produsen minyak yang sederhana. Beberapa ladang minyak Sudan terletak di daerah perbatasan Sudan dan Sudan Selatan. Sehingga saat menjelang kemerdekaan, Sudan dan Sudan Selatan merundingkan bagaimana pembagian yang tepat dari pendapatan minyak setelah pemisahan diri dari Sudan Selatan.

Pasca ditetapkan sanksi embargo di Sudan pada tahun 1997, tentunya Sudan dilarang secara tegas untuk melakukan ekspor dan impor, penjualan peralatan dan layanan pertahanan, serta memutuskan hubungan

perdagangan bilateral. Namun, pasca di cabutnya sanksi tersebut pada 2017, Sudan kembali diperkenankan untuk melakukan perdagangan kembali. Seperti halnya, Amerika Serikat yang mulai melakukan kegiatan ekspor-impor di Sudan. Berdasarkan data yang ditemukan, Amerika Serikat mulai melakukan impor minyak mentah pada tahun 2019 yaitu US\$14.8 dan terus melonjak hingga tahun 2020, yaitu sebesar US\$74.96 (Trading Economics, n.d.).

2.5.2. Keterlibatan perusahaan energi Amerika Serikat di Sudan

Terdapat beberapa perusahaan minyak AS yang secara operasionalnya mengeksploitasi mineral di Sudan, sehingga dampaknya terhadap kebijakan Amerika Serikat mengenai Sudan memiliki *track record* yang dipengaruhi oleh faktor eksploitasi minyak, seperti Chevron, sebuah perusahaan minyak Amerika yang menemukan minyak di Sudan pada akhir tahun 1970-an dan 1980-an di *Greater Upper Nile Region*. Namun, munculnya perang saudara kedua di Sudan pada tahun 1983 membuat Chevron tidak dapat melanjutkan eksplorasi dan produksi (Sudan Tribune, 2017). Kepentingan asing terhadap minyak Sudan telah terhambat oleh kekacauan dan kekejaman hak asasi manusia yang sedang berlangsung di negara tersebut. Ambisi Chevron untuk membangun ladang minyak di Sudan dibatalkan pada tahun 1980-an, karena kerusakan yang meluas di ladang minyak. Pada tahun 1993, bisnis minyak independen yang lebih kecil berpartisipasi dalam eksplorasi dan produksi minyak,

mengubah negara ini menjadi produsen minyak setelah satu dekade. Sejak tahun 1997, sanksi AS melarang perusahaan-perusahaan untuk mengeksplorasi, memproduksi, atau membeli minyak Sudan. Para pegiat hak asasi manusia mendesak perusahaan-perusahaan Barat untuk menarik diri dari sektor minyak pada awal tahun 2000-an (OGINDONESIA, 2025). Untuk saat ini, tidak banyak perusahaan Amerika Serikat yang berbasis di Sudan, tetapi warga negara AS merupakan pemimpin dari banyaknya bisnis yang beroperasi disana. Sejumlah negara bagian Amerika Serikat mendapatkan keuntungan finansial dari eksploitasi minyak di wilayah Sudan tersebut (Putri, 2022).

2.6 Tanggapan Sudan dan Komunitas Internasional terhadap Intervensi AS

2.6.1. Sikap pemerintah Sudan terhadap intervensi AS

Dalam menanggapi intervensi kemanusiaan yang Amerika Serikat, pemerintah Sudan memberikan beragam respon tergantung dengan periode waktunya. Saat Sudan dibawah pemerintahan Omar Al-Bashir, pemerintah Sudan cenderung menaruh rasa curiga atas bantuan bantuan yang diberikan oleh aktor Internasional, seperti Amerika Serikat. Hal tersebut dikarenakan intervensi sebagai alat dalam campur tangan untuk mengganggu kedaulatan dari Sudan. Dikutip dalam buku *Sudan: The Failure and Division of an African State* karya Richard Cockett, Secara khusus, pemerintahan Omar al-Bashir telah menolak bantuan kemanusiaan, menggunakan narasi anti-imperialis sebagai pembenaran (Cockett, 2016). Jika dikaji lebih dalam lagi, penolakan bantuan tersebut

bisa berimplikasi pada strategi dari rezim Al-Bashir untuk mempertahankan kekuasaannya dan terlepas dari pertanggungjawaban yang telah dilakukannya di Darfur. Sehingga, Sudan yang mengambil sikap untuk membatasi adanya bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh aktor internasional memiliki alasan yaitu untuk menjaga keamanan nasionalnya. Seperti halnya, bantuan kemanusiaan dalam bidang kesehatan dari *Medecins Sans Frontieres (MSF)* mengalami pembatasan distribusinya (MEDECINS SANS FRONTIERES, 2025). Namun, dalam beberapa situasi, Sudan menerima bantuan kemanusiaan dari Amerika Serikat dengan syarat dan ketentuannya, serta melakukan pembatasan distribusi.

2.6.2. Respons Masyarakat Sudan dan Kelompok Oposisi

Baik di dalam negeri maupun di luar negeri, para profesional dan warga negara Sudan tidak senang dengan cara komunitas internasional dan negara lain yang terlibat seperti Amerika Serikat dalam menanggapi situasi negara ini. Mereka percaya bahwa sulit bagi rakyat Sudan untuk memberikan jawaban mereka sendiri karena para utusan Barat, terutama mantan utusan PBB, telah terlalu banyak mencampuri urusan Sudan. Terlepas dari identitas siapa para dalang dari kekacauan ini, rakyat Sudan membutuhkan kepemimpinan pemerintahan yang jujur, bertanggung jawab, dan berpusat pada penderitaan rakyat. Sulit bagi para mediator untuk mencapai kesepakatan di antara rakyat Sudan karena banyak

pengungsi konflik percaya bahwa mereka tidak memiliki pengaruh atas apa yang terjadi (Jobson & Hashim, 2024).

Ada kebutuhan akan pemimpin politik yang inspiratif, tetapi saat ini tidak ada cukup banyak. Tingkat ketidakpercayaan yang tinggi antara kedua faksi yang bertikai menjangkiti masyarakat, sehingga menimbulkan kesulitan yang signifikan bagi rakyat Sudan. Semua orang setuju bahwa ini adalah konflik yang menguras sumber daya semua pihak dan tidak ada satu pihak pun yang dapat memenangkan kemenangan militer. Bahkan jika perdamaian tercapai hari ini, mayoritas rakyat Sudan masih harus bekerja keras untuk pulih dari kehancuran infrastruktur negara yang nyaris sempurna, termasuk sektor manufaktur dan kesehatan (Jobson & Hashim, 2024).